

Lampiran 4.

Undang-undang Selama Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu

Undang-undang merupakan bentuk peraturan tertulis yang berlaku umum, yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Substansi materi yang harus diatur dengan undang-undang berkaitan dengan: (1) pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan (2) substansi yang diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang (UU Nomor 10/ 2004). Mengingat bahwa undang-undang adalah hasil pembahasan bersama Presiden, DPR-RI dan DPD-RI (khusus yang berkaitan dengan otonomi daerah), maka telaah terhadap undang-undang dapat digunakan untuk menilai skala prioritas bidang pengaturan dan perlindungan kepentingan umum yang menjadi fokus perhatian suatu periode pemerintahan.

Undang-undang yang ditelaah adalah undang-undang yang diterbitkan selama periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, dari periode tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 31 Agustus 2007. Jumlah undang-undang yang diterbitkan selama periode tersebut sebanyak 77 undang-undang, yang terdiri dari 14 undang-undang pada tahun 2005, 23 undang-undang pada tahun 2006; dan 40 undang-undang pada tahun 2007 (Agustus 2007). Substansi pengaturan undang-undang selengkapnyanya dapat diikuti mulai halaman 7, pada buku II ini. Pada tahun 2005 undang-undang yang diterbitkan umumnya berkaitan dengan bidang: keuangan negara, pemerintahan daerah, dan bidang sosial, seperti: ketenagakerjaan, sistem keolahragaan, pembentukan peradilan agama dan HAM, guru dan dosen. Pada tahun 2006, undang-undang yang diterbitkan berkaitan dengan bidang: keuangan negara, pemerintahan daerah, ekonomi, politik, hukum dan bidang sosial. Pada tahun 2007, undang-undang yang diterbitkan berkaitan dengan pembentukan 25 kabupaten/ kota baru, bidang politik, penanaman modal dan penataan ruang.

Telaah terhadap undang-undang dalam kaitannya dengan pembangunan KUMKM dinilai dapat mengetahui besarnya komitmen pemerintah dalam suatu periode pemerintahan terhadap pembangunan KUMKM di Indonesia. Telaah terhadap undang-undang didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) relevansi substansi pengaturan undang-undang dengan upaya pemberdayaan KUKM, (2) signifikansi dampak pengaturan terhadap perkembangan kinerja pemberdayaan KUKM pada masa mendatang, dan (3) daya guna substansi pengaturan dalam mempengaruhi kinerja pemberdayaan KUKM di Indonesia.

Relevansi dikaitkan dengan keterkaitan substansi pengaturan dalam undang-undang dengan pemberdayaan KUKM, yang dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu: (1) undang-undang mengatur langsung KUKM, sebagai contoh: undang-undang tentang perkoperasian, unadang-undang usaha kecil; (2) undang-undang yang tidak mengatur



langsung KUKM, tapi dinilai berpengaruh terhadap perkembangan KUKM pada masa mendatang, seperti: undang-undang tentang perpajakan, tata ruang, penanaman modal, dan lain-lain; (3) undang-undang yang tidak mengatur langsung KUKM, tapi seharusnya dapat diberikan muatan yang berkaitan dengan KUKM, seperti: Undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan (4) undang-undang yang tidak mengatur KUKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur secara spesifik mengenai KUKM, seperti: Undang-undang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris. Hasil telaah dari sisi relevansi undang-undang dengan pemberdayaan KUMKM mengindikasikan tidak ada undang-undang yang langsung mengatur KUMKM, 46 undang-undang dinilai tidak mengatur KUMKM, tapi memiliki pengaruh terhadap upaya pemberdayaan KUMKM, 1 undang-undang yang tidak mengatur KUMKM, tapi seharusnya mengatur KUMKM, dan 30 undang-undang yang tidak mengatur dan tidak relevan dengan pemberdayaan KUMKM secara langsung.

Penilaian terhadap relevansi dan pengaruh undang-undang tergantung pada bagaimana pelaksanaan dari undang-undang tersebut, dan ditentukan oleh perspektif mengenai KUMKM yang dimiliki oleh pelaksana undang-undang. Undang-undang yang tidak relevan dapat memiliki pengaruh kepada KUMKM secara tidak langsung melalui dampak dari pelaksanaan undang-undang tersebut. Sebagai contoh: Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mengatur mengenai KUMKM, tapi jika undang-undang ini dilaksanakan secara memadai, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia; yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja KUMKM melalui perbaikan SDM yang tersedia bagi UMKM pada masa mendatang.

Signifikansi dikaitkan dengan besaran dampak pengaturan undang-undang terhadap upaya pengembangan KUKM pada masa mendatang, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) undang-undang yang dinilai berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan KUKM, seperti: Undang-undang tentang Resi Gudang, (2) undang-undang yang dinilai berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberdayaan KUKM, seperti: Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota, dan (3) undang-undang yang dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan KUKM pada masa mendatang, seperti: Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama. Hasil telaah dari sisi signifikansi pengaruh undang-undang terhadap pemberdayaan KUMKM mengindikasikan 10 undang-undang memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan KUMKM; 37 undang-undang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pemberdayaan KUMKM; dan 30 undang-undang tidak berpengaruh terhadap KUMKM dalam jangka pendek-menengah.

Daya Guna substansi pengaturan undang-undang dikaitkan dengan aspek kinerja KUKM yang dipengaruhi, yang dikelompokkan menjadi 5, yaitu: (1) mengubah struktur pasar yang dihadapi KUKM, (2) mengubah perilaku pelaku pasar yang terkait dengan pasar KUKM, (3) mengubah kinerja pasar KUKM, (4) mempengaruhi kinerja KUKM melalui perubahan atau perbaikan birokrasi pemerintahan, dan (5) tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja KUKM pada masa mendatang. Hasil telaah daya guna undang-undang terhadap KUMKM mengindikasikan 1 undang-undang berdaya guna untuk mempertahankan struktur pasar KUMKM yaitu: Undang-undang tentang Pasar Modal; 3 undang-undang yang memiliki daya guna mengubah perilaku pelaku pasar KUMKM; 3 undang-undang yang memiliki daya guna meningkatkan

kinerja atau kapasitas usaha KUMKM; 44 undang-undang memiliki daya guna mengubah birokrasi pemerintahan, sehingga dampaknya terhadap upaya pemberdayaan KUMKM baru dirasakan dalam jangka panjang; dan 26 undang-undang dinilai tidak berdaya guna terhadap KUMKM.

Hasil telaah undang-undang selama periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2005– Agustus 2007 selengkapny dapat diikuti pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Telaah Undang-Undang Selama Periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2005 – Agustus 2007

Thn	No. UU	Tentang	Relevansi	Signifkansi	Daya guna	Lingkup Bidang	Sektor Ekonomi
2005	UU 01/05	Perubahan atas Undang-Undang no. 36 tahun 2004 tentang APBN tahun 2005	2	1	4	Keuangan negara	Lintas sektor
	UU 02/05	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang	4	2	3	Ketenagakerjaan	Lintas Sektor
	UU 03/05	Sistem Keolahragaan Nasional	3	3	5	Keolah ragaan	Pariwisata
	UU 04/05	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten	4	3	5	Kelembagaan peradilan	Jasa pemerintahan
	UU 05/05	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	4	3	5	Kelembagaan peradilan	Jasa pemerintahan
	UU 06/05	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	4	3	5	Kelembagaan peradilan	Jasa pemerintahan
	UU 07/05	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	4	3	5	Kelembagaan peradilan	Jasa pemerintahan
	UU 08/05	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang	4	3	4	Pemerintahan Daerah	Jasa pemerintahan
	UU 09/05	Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2005	2	1	4	Keuangan negara	Lintas sektor
	UU 10/05	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 2 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatra Utara Menjadi Undang-Undang	2	2	4	Kelembagaan pemerintah	Lintas sektor
	UU 11/05	Pengesahan international covenant on economic, social and cultural rights (kovenan internasional tentang Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya)	2	2	4	Hubungan internasional	Lintas sektor
	UU 12/05	Pengesahan <i>international covenant on civil and political rights</i> (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)	4	3	5	Hubungan internasional	Lintas sektor
	UU 13/05	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006	2	1	4	Keuangan Negara	Lintas sektor
	UU 14/05	Guru dan Dosen	4	3	5	Pendidikan	Jasa pendidikan
2006	UU 01/06	Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	4	3	5	Peradilan	Jasa pemerintahan
	UU 02/06	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2003	4	3	4	Keuangan negara	Lintas sektor

Thn	No. UU	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Lingkup Bidang	Sektor Ekonomi
	UU 03/06	Perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	4	3	5	Peradilan	Jasa pemerintahan
	UU 04/06	Pengesahan International treaty on plant genetic resources for food and agriculture	2	2	4	Hubungan internasional	Pertanian
	UU 05/06	Pengesahan international convention for the supression of the terrorist bombings, 1997	4	3	5	Hubungan internasional	Lintas sektor
	UU 06/06	Pengesahan International convention for the supression of the financing of terrorism 1999	4	3	5	Hubungan internasional	Jasa Keuangan
	UU 07/06	Pengesahan United Nations Convention against corruption, 2003	4	3	5	Hubungan internasional	Lintas sektor
	UU 08/06	Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai bantuan hukum dan timbal balik masalah pidana	4	3	5	Hubungan internasional	Jasa Pemerintahan
	UU 09/06	Sistem Resi Gudang	2	1	2	Perdagangan	Perdagangan
	UU 10/06	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD menjadi Undang-Undang.	4	3	5	Kelembagaan negara	Jasa Pemerintahan
	UU 11/06	Pemerintahan Aceh	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 12/06	Kewarganegaraan Republik Indonesia	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
	UU 13/06	Perlindungan Saksi dan Korban	4	3	5	Peradilan	Jasa pemerintahan
	UU 14/06	Perubahan atas undang-undang no. 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006	2	1	4	Keuangan Negara	Lintas sektor
	UU 15/06	Badan Pemeriksa Keuangan	4	3	5	Kelembagaan negara	Jasa pemerintahan
	UU 16/06	Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	2	1	2	Pertanian	Pertanian
	UU 17/06	Perubahan atas Undang-undang no. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	2	2	3	Kepabeanan	Perdagangan
	UU 18/06	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007	2	1	4	Keuangan negara	Lintas sektor
	UU 19/06	Dewan Pertimbangan Presiden	4	3	5	Kelembagaan pemerintah	Jasa pemerintahan
	UU 20/06	Pengesahan Convention on the Prohibition of the use, stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines, and on their destruction	4	3	5	Hubungan internasional	Pertambangan
	UU 21/06	Pengesahan persetujuan antara pemerintah Indoneisa dengan pemerintah republik India tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan	4	3	5	Hubungan internasional	Jasa Pemerintahan
	UU 22/06	Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004	4	3	4	Keuangan negara	Lintas sektor
	UU 23/06	Administrasi Kependudukan	4	3	4	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
2007	UU 01/07	Pembentukan Kab. Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor

Thn	No. UU	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Lingkup Bidang	Sektor Ekonomi
	UU 02/07	Pembentukan Kab. Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 03/07	Pembentukan Kab. Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 04/07	Pembentukan kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 05/07	Pembentukan Kab. Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 06/07	Pembentukan Kab. Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 07/07	Pembentukan Kab. Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 08/07	Pembentukan kota Subulussalam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 09/07	Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 10/07	Pembentukan Kab. Bolang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 11/07	Pembentukan Kab. Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 12/07	Pembentukan Kab. Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 13/07	Pembentukan Kab. Bandung Barat, di Provinsi Jawa Barat	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 14/07	Pembentukan Kab. Buton Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 15/07	Pembentukan Kab. Siau Tagulandang Biaro	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 16/07	Pembentukan Kab. Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 17/07	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025	2	1	4	Administrasi Pemerintahan	Lintas sektor
	UU 18/07	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen 2003	4	3	5	Hubungan internasional	Perikanan
	UU 19/07	Pembentukan Kab. Mamberamo Raya, di Provinsi Papua	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 20/07	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Keamanan	4	3	5	Hubungan internasional	Lintas sektor
	UU 21/07	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	4	3	5	Peradilan	Lintas sektor
	UU 22/07	Penyelenggaraan Pemilu	4	3	5	Pemilu	Jasa Pemerintahan
	UU 23/07	Perkeretaapian	4	3	5	Perkeretaapian	Transportasi
	UU 24/07	Penanggulangan Bencana	4	3	5	Administrasi Pemerintahan	Lintas sektor
	UU 25/07	Penanaman Modal	2	1	1	Penanaman Modal	Lintas sektor
	UU 26/07	Penataan Ruang	2	2	3	Tata Ruang	Konstruksi
	UU 27/07	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	1	2	Pengelolaan Pesisir	Perikanan
	UU 28/07	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	2	2	4	Kuangan Negara	Pendapatan Negara
	UU 29/07	Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	2	2	4	Pemerintahan daerah	Jasa pemerintahan



Thn	No. UU	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Lingkup Bidang	Sektor Ekonomi
	UU 30/07	Energi	4	2	4	Energi	Jasa pemerintahan
	UU 31/07	Pembentukan Kota Tual di Maluku	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 32/07	Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 33/07	Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 34/07	Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 35/07	Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 36/07	Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 37/07	Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 38/07	Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara	2	2	4	Pemerintahan daerah	Lintas sektor
	UU 39/07	Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai	2	2	4	Keuangan Negara	Lintas sektor
	UU 40/07	Perseroan Terbatas	2	2	4	Badan Hukum	Lintas sektor

Keterangan :

Relevansi:

1. Undang-undang mengatur langsung KUKM;
2. Undang-undang tidak mengatur langsung KUKM, tetapi berpengaruh terhadap perkembangan KUKM di masa mendatang
3. Undang-undang tidak mengatur langsung KUKM, tetapi seharusnya diberikan muatan yang berkaitan dengan KUKM
4. Undang-undang Tidak mengatur KUKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur KUKM

Signifikansi:

1. Undang-undang dinilai berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan KUKM
2. Undang-undang dinilai berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberdayaan KUKM
3. Undang-undang dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan KUKM pada masa mendatang

Daya Guna:

1. Undang-undang mampu mengubah struktur pasar yang dihadapi KUKM
2. Undang-undang mampu mengubah perilaku pelaku pasar yang terkait dengan pasa KUKM
3. Undang-undang mampu mengubah kinerja pasar KUKM
4. Undang-undang mampu mempengaruhi kinerja KUKM melalui perubahan atau perbaikan birokrasi pemerintahan
5. Undang-undang tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja KUKM pada masa mendatang